



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang
Tempat lahir : Japing
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Mei 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Japing Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang
Kabupaten Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua KPPS TPS 004, Desa Sunggumanai, Kecamatan
Pattalassang, Kabupaten Gowa ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Marhumah Majid, S.H, M.H., Khairul Mannang, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Awaluddin Yasir, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "Marhumah Majid & Rekan" yang beralamat di Jalan Mangka Dg Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 03 - 2018 dengan Reg. Nomor: 46/KP/Pid/PN.S/2018;-----



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 439/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 439/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/R.4.14/Pemilu.2/07/2018, tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Hj. Mariati Dg. Baji binti Baso Dg. Buang (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di TPS 004 di Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) Tempat pemungutan suara atau lebih*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 berlangsung pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tersebut antara lain diangkat pula pihak penyelenggara pemilihan salah satu diantaranya adalah Kelompok Penyelenggara


Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang
Kabupaten Gowa Nomor : 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018
Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Suara
Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018,
Terdakwa diangkat sebagai Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04
Suara Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa.

- Bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 tersebut, dapat diikuti oleh para pemilih atau orang yang berhak memilih yang namanya telah tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) di lokasi atau wilayah lingkup dimana TPS 004 bersangkutan berada.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, bertempat di Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa dilaksanakan pula proses pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai sejak pukul 07.00 s/d 14.00 wita. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung, para pemilih atau orang yang berhak memilih adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Salinan DPT TPS 004 (Empat) Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah pemilih Laki-laki 319 orang, Perempuan 303 orang jumlah pemilih 622 orang, dimana para pemilih atau orang yang berhak memilih tersebut pada saat proses pemilihan mengisi pula Daftar Hadir (Formulir Model C-7) yang disediakan. Kemudian sejak pukul 12.00 wita, dibuka kesempatan untuk para pemilih atau orang lain yang berhak memilih



Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa namun dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan (SUKET).

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 wita, saat dibuka kesempatan memilih untuk para pemilih atau orang yang berhak yang tidak tercantum namanya dalam DPT, namun memiliki KTP dan SUKET, terdapat beberapa orang atau warga yang ikut hadir mengisi pula daftar hadir yang disediakan yaitu atas nama Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah, yang mana ketiga orang tersebut tidak memiliki KTP setempat, tidak ada pula SUKET serta tidak tercantum namanya dalam DPT TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, melainkan hanya dengan membawa Kartu Keluarga saja, yang seharusnya ditolak untuk memilih karena bukan pemilih dan tidak termasuk orang yang berhak memilih, akan tetapi Terdakwa justru mempersilahkan membiarkan ketiga orang tersebut yaitu Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah untuk memilih yang kemudian ketiga orang dimaksud pun ikut memilih dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah tersebut tidak tercantum nama mereka dalam DPT TPS 004 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, tidak pula memiliki KTP dan juga tidak SUKET untuk mengikuti proses pemilihan dimaksud atau dengan kata lain ketiga orang tersebut adalah orang yang tidak berhak memilih, dimana setelah usai melakukan proses pemilihan tersebut, Syaiful Bahri, Herawaty dan Hamsiah mengisi dan membubuhkan tandatangannya dalam Daftar Hadir (Formulir Model C-7) yang disediakan. TPS 04 Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa.

178 ayat (2), (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-02/R.4.14/Pemilu.2/07/2018,tanggal 7 Agustus 2018pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasayang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 178 C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungguminasayang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgmpada tanggal 10 Agustus2018telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap asli surat keputusan ketua panitia pemungutan suara desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang No. 01/SK/PPS-DSM/VI/2018 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan biaya kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminas pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid.S/2018/PN sgm, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminas kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid.S/2018/PN Sgm;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminas pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:

diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasakepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 2/Akta.Pid.S/2018/PN Sgm, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm;-----

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage)masing-masing Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm, bahwa JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Sungguminasatelah memberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umumdan kepada Penasihat Hukum Terdakwamasing-masing pada tanggal 15 Agustus 2018, untuk mempelajari berkas perkaraNomor:2/Pid.S/2018/PN Sgmdi Kepaniteraan Pengadilan NegeriSungguminasasebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal 1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;-----

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa mencermati putusan judex factie pada halaman 34 paragraf pertama, "menimbang bahwa apabila mencermati bunyi dalam Pasal 61 Undang- undang Nomo 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka dimaknai jika seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik asalkan KTP tersebut beralamat di wilayah tempat pemungutan suara"

Terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut penuntut umum berpendapat sekaligus sebagai alasan banding ini bahwa tidak semua warga negara dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, kecuali adalah warga negara yang harus terdaftar sebagai pemilih, dengan keharusan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 maka penggunaan Kartu Keluarga sebagai bukti sekaligus dasar dalam menentukan ada atau tidaknya hak

tersebut menurut penuntut umum adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti mengetahui dan menghendaki apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi memori van Toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Bahwa dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni:

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan keinsyafan
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis

Menurut Prof Sathochid Kartanegara yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jufri, SH yang menyatakan :

- Bahwa benar warga bisa menyalurkan hak suaranya di TPS dengan menggunakan kartu keluarga (KK) dengan syarat terdaftar di DPT tapi apabila tidak terdaftar di DPT maka tidak boleh memberikan hak pilih di TPS dengan menggunakan kartu keluarga (KK).
- Bahwa benar bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan bimtek sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh anggota KPPS.
- Bahwa benar saat saksi melakukan Bimtek kepada KPPS, saksi telah mensosialisasikan UU. No 10 Tahun 2016 dan pedoman-pedoman lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur termasuk PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Sehingga dengan alasan terdakwa bahwa Kartu Keluarga (KK) adalah sama dengan Surat Keterangan (SUKET) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi M. Jufri, SH selaku PPK Kecamatan Pattalassang yang pada pokoknya telah memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam hal ini termasuk terdakwa selaku ketua KPPS, sehingga tidak ada alasan bagi

berbeda dengan Surat Keterangan (SUKET) atau dengan ~~Kata lain~~ Kartu Keluarga (KK) tidak termasuk syarat untuk seorang warga negara dianggap berhak memilih.

Bahwa adapun alasan terdakwa bahwa ia tidak mengetahui ada pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) menurut penuntut umum alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini daftar hadir (C7) kemudian secara nyata juga ada 3 (tiga) orang yang tidak terdaftar di DPT, dan ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik maupun Surat Keterangan (SUKET) melainkan hanya dengan Kartu Keluarga (KK) dengan demikian dapat kami tegaskan sekali lagi alasan terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan oleh karena pertimbangan majelis hakim *judex factie* pada bagian ini mohon kiranya dapat dikesampingkan.

Bahwa hal sebaliknya berdasarkan uraian penuntut umum tersebut di atas dalam kondisi demikian dapat disimpulkan terdakwa telah mengetahui atau menghendaki perbuatan yang telah dilakukannya atau setidaknya terdakwa menyadari kemungkinan sebuah kondisi dimana ada pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) dalam memilih sehingga harusnya tidak berhak memilih namun dengan tetap memilihnya orang yang hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) tersebut memperlihatkan secara nyata bahwa terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*pemilihan*" melanggar Pasal 178 C Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kami serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami rintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Agustus 2018;-----

bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana.

Bahwa amar putusan pengadilan Nomor: 2/Pid.S/2018/PN.Sgm tanggal 10 Agustus 2018 menyatakan Terbanding/Terdakwa Hj. Mariati Dg Baji Binti Baso Dg. Buang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan membebaskan Terbanding Hj. Mariati Dg. Baji Binti Baso Dg. Buang dari seluruh dakwaan penuntut umum serta memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Bahwa atas putusan a quo penuntut umum menyatakan Banding dan menyerahkan memori bandingnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Agustus 2018.

Bahwa Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

"Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan iain dalam Undang-Undang ini".

Bahwa pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Ayat (1) *"Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan perkara".*

Ayat (2) *"dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima"*

Bahwa dalam ketentuan diatas tidak diatur dengan tegas mengenai syarat untuk dilakukan upaya hukum banding, oleh karena itu upaya banding dalam ketentuan di atas dimaknai sebagai upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama yang memuat pemidanaan sehingga terhadap putusan

hukum, dan putusan pengadilan acara cepat tidak diatur dalam ketentuan di atas sehingga sepanjang tidak diatur dalam undang-undang pemilihan maka mengacu pada ketentuan KUHP.

Bahwa terhadap upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama di atur dengan tegas dalam Pasal 233 (1) KUHP dan Pasal 67 KUHP, untuk lebih lengkapnya Terbanding akan mengutip isi ketentuan tersebut, sebagai berikut:

Pasal 233 ayat (1) KUHP menyebutkan:

"Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum".

Pasal 67 KUHP menegaskan:

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan acara cepat".

Bahwa terhadap penuntut umum yang menyatakan banding dan atas Putusan bebas Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 2/Pid.S/2018/PN.Sgm tanggal 10 Agustus 2018, adalah tidak berdasar hukum oleh karena putusan bebas menurut hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sehingga upaya hukum banding Penuntut umum atas putusan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya adalah pertimbangan yang berdasar hukum dan bersesuaian fakta persidangan dalam perkara a quo, yang mana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan sepanjang pemilih tersebut bertempat tinggal/berdomisili di wilayah TPS dan dapat dibuktikan dengan identitas kependudukan. Terhadap perkara a quo berdasarkan fakta persidangan 3 orang pemilih yang dimaksud penuntut umum terbukti bertempat tinggal/berdomisili di Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang yang merupakan cakupan wilayah TPS 04.

Bahwa Ke 3 orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KK dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di TPS 04.

Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama pemilih, dan alamatnya yakni beralamat di Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa yang juga tempat dimana TPS 04 berada, sehingga hal tersebut

menggunakan hak konstitusinya untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di TPS 04.

Bahwa selain nama, tanggal lahir dan alamat yang tercantum dalam KK juga tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada masing-masing nama yang tercantum dalam KK tersebut. No Induk Kependudukan (NIK) dalam KK adalah sama dengan NIK yang tercantum dalam KTP, dan setiap warga negara hanya dapat memiliki satu NIK. KTP hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil apabila seseorang sudah terdaftar dalam KK dan telah berusia 17 tahun. Sehingga sangat tidak mungkin ada NIK dalam KTP yang berbeda dengan NIK pada KK. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan, bahwa hasil investigasi KPU Kabupaten Gowa dan Panwas Kabupaten Gowa, ditemukan Herawati salah seorang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan hak pilih dengan menggunakan KK ternyata memiliki KTP yang NIKnya sama dengan NIK yang tertera dalam KK. Pada saat pemungutan suara, Herawati selain membawa KTP juga membawa KK, namun terdaftar sebagai Pengguna KK.

Bahwa berdasarkan surat Edaran KPU dan surat Edaran Bawaslu maka terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP ataupun Suket dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan Kartu Keluarga, Paspur atau SIM selain itu orang yang hendak memilih di TPS, merupakan warga setempat dan diketahui oleh Kepala Lingkungan setempat. Hal ini sesuai dengan keterangan **H. Syamsuddin (Kepala Dusun Sunggumanai)** yang menerangkan bahwa 3 orang warga tersebut yakni: Syaiful Bahri; Herawaty; dan Hamsiah adalah warga Sunggumanai dan bertempat tinggal di wilayah TPS 004. Hal senada juga ditegaskan saksi **Nuzul Fitri** (komisioner KPU Kab. Gowa) dan **SALMA RASYID DG JANNA (Panwascam Lalabata)** bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI dan Surat Edaran Bawaslu RI maka warga dapat ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan menggunakan KK, SIM atau Paspur sepanjang orang tersebut adalah warga tempat dimana TPS tersebut berada.

Bahwa Pasal 23 PKPU No.2 Tahun 2017 menyebutkan "pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS sesuai dengan alamat pemilih.

Dengan demikian pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KK, SIM ataupun Paspur pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 adalah sah dan berdasar menurut hukum.

mengetahui ada pemilih yang menggunakan KK menurut penuntut umum adalah alasan yang tidak benar oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam hal ini daftar hadir (C7") dengan demikian dapat disimpulkan telah mengetahui atau menghendaki.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang keliru, oleh karena tidak ada sikap batin (niat atau maksud dan tujuan) atau dengan kata lain tidak ada kehendak dari Terbanding untuk melakukan hal tersebut.

Jika Terbanding dengan sengaja membiarkan ke-3 orang tersebut memilih menggunakan KK maka dalam formulir C7 penggunaan KK tidak akan muncul, pasti Terbanding akan mengubah data tersebut dengan data menggunakan KTP atau Suket, apalagi pada saat itu sama sekali tidak ada keberatan dari saksi atau pengawas pemilihan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh karena terdakwa tidak mengetahui adanya pemilih yang menggunakan KK. Pemilih yang menggunakan KK baru diketahui Terbanding setelah dilakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan.

Bahwa tentang unsur dengan sengaja sudah dipertimbangkan oleh *Judex factie* berdasarkan hukum dan fakta persidangan dalam putusannya dengan menyatakan tidak terbukti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terbanding dalam perkara ini.

Bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto SH), hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud dan tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan yang bertentangan dengan hukum tersebut.

Bahwa kesengajaan adalah suatu Dolus atau opzet, menurut penjelasan resmi Kitab undang-undang Hukum Pidana (Mvt) adalah *wiljen en weten*. Pengertian *Wiljen en weten*, menurut Prof. Satochid Kertanegara, SH (Satochid Kertanegara : hal 291) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*wiljen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) perbuatan itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal demi pasal KUHP "sengaja" adalah termasuk didalamnya niat si pembuat yakni niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Prof. Sudarto, SH (Sudarto ; 1975; Hal

menentukan perbuatan Dolus atau culpa. Dari pendapat tersebut harus dicari hubungan batin dipembuat dengan perbuatan dan tujuan dilakukannya perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di TPS 004 terdapat 3 orang warga yang memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, adapun sebagai dasar 3 orang warga tersebut dalam memberikan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Bahwa pada pukul 12.00 wita sampai dengan 13.00 wita ke 3 (tiga) warga tersebut mendatangi TPS 004 dengan membawa KK dan memperlihatkan kepada petugas TPS dan mengisi daftar hadir.

Bahwa pada saat Ke-3 (tiga) orang tersebut menunjukkan KK lalu kemudian mengisi daftar hadir dan telah memberikan suara tidak ada satu orangpun yang keberatan baik oleh Petugas TPS, Panwas maupun saksi/Tim Paslon. Selain itu dari keterangan seluruh saksi-saksi dalam persidangan tidak ada yang dapat membuktikan adanya kesengajaan ataupun perintah maupun petunjuk/arahan dari Terbanding/Terdakwa agar membolehkan warga yang menggunakan KK boleh ikut memilih.

Bahwa dalam pemungutan suara pada TPS 04 terdapat 7 orang KPPS yang memiliki tugas berbeda. KPPS 4 (Irwandi) bertugas mencatat dan mengisi daftar hadir pemilih dan menuliskan pada formulir C7 adalah KPPS 4 (Irwandi).

Bahwa KPPS 4 (Irwandi) tidak memberitahukan kepada Terbanding terkgit adanya pemilih yang menggunakan KK, karena menurut Irwandi (anggota KPPS 4) KK dibolehkan sebagai dasar untuk ikut memilih. Dengan demikian sanaat ielas bahwa Terbanding sama sekali tidak mengetahui adanya pemilih yang menggunakan KK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. oleh karena itu tidak berdasar hukum untuk mendudukkan Hi. Mariati Dg. Baii Binti Baso Do. Buang sebagai Terdakwa dalam perkara a auo.

Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya 3 orang pemilih yang menggunakan KK pada saat proses Rekapitulasi hasil yang ditandai dengan penginputan data dalam Formulir C KWK dan CI KWK, namun baik Panwas (PTPs) maupun saksi tidak ada yang keberatan, dan Terdakwa sendiri berdasarkan pengalaman dan kebiasaan selama menjadi KPPS berpandangan

Bahwa surat Edaran KPU dan surat Edaran Bawaslu pemilih yang tidak memiliki KTP ataupun Suket dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan Kartu Keluarga, Paspur atau SIM dan merupakan warga setempat di TPS berada serta diketahui oleh Kepala Lingkungan setempat.

Bahwa sesuai keterangan H. Syamsuddin (Kepala Dusun Sunggumanai) yang menerangkan bahwa 3 orang warga tersebut yakni: Syaiful Bahri; Herawaty; dan Hamsiah adalah warga Sunggumanai dan bertempat tinggal di wilayah TPS 004. Hal senada juga ditegaskan saksi Nuzul Fitri (komisioner KPU Kab. Gowa) bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI dan Surat Edaran Bawaslu RI maka warga dapat ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan menggunakan KK sepanjang orang tersebut adalah warga tempat dimana TPS tersebut berada.

Selain itu terhadap kasus yang menimpa terdakwa oleh Komisioner KPU Kab.Gowa telah memanggil terdakwa dan dimintai keterangannya terkait permasalahan penggunaan KK oleh ke-3 (tiga) warga tersebut dan hasilnya terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan alasan adanya surat Edaran KPU RI dan Bawaslu RI serta tidak adanya keberatan pada saat di TPS.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi **SALMA RASYID DG JANNA (Panwascam Lalabata)** menerangkan bahwa terhadap pencatatan pengguna KK, saksi tidak merekomendasikan untuk dicoret dan membuat catatan kejadian khusus. Selain itu menurut keterangan saksi **Gaffar (Petugas Pengawas TPS 004)** pada saat pemungutan suara tidak ada yang berkeberatan termasuk saksi sendiri selaku petugas Pengawas TPS 004 terkait adanya penggunaan KK untuk memberikan hak suara pada pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi Jufri(Ketua PPK Patallassang) yang benar sesuai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Saksi Sebagai ketua PPK melakukan Bimtek kepada KPPS
- Bimtek dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018, 2 Minggu sebelum Pemilihan
- Bimtek dilakukan untuk seluruh KPPS hanya sekali
- Bimtek dilakukan sebelum adanya Surat Edaran Bawaslu dan Surat Edaran KPU.
- Bahwa ternyata pada saat pemilihan ada surat edaran bawaslu yang membolehkan untuk memilih menggunakan KK, SIM, Paspur sepanjang pemilih bersangkutan bertempat tinggal di wilayah tersebut.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 C ayat (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016.

4. Bahwa unsur menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih tidak terbukti.

Bahwa unsur menyuruh melakukan iuaa tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan atau membuktikan adanya perbuatan terdakwa vana menyuruh dan mengarahkan ke-3 (tiaaj warga yakni : Syaiful Bahri; Herawatv: dan Hamsiah untuk datang memberikan hak suaranya pada TPS 04,

Bahwa Herawaty adalah warga yang memiliki KTP yang beralamat di sunggumanai tempat dimana TPS 004 berada dan terdaftar dalam DPT, sementara saiful bahri belum memiliki KTP karena tidak adanya blangko sehingga tidak melanjutkan untuk mengurus KTP selain itu menurut saiful bahri dengan adanya KK sudah menegaskan bahwa dia merupakan warga sunggumanai.

Bahwa herawaty yang merupakan satu dari ke-3 (tiga) orang warga sunggumanai tempat dimana TPS 004 berada yang telah memiliki KTP dan kartu keluarga dan terdaftar di alamat Sunggumanai, sehingga berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI dan Surat Edaran KPU RI, maka ke-3 orang tersebut memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Dengan demikian unsur menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, sehingga sudah benar menurut hukum pertimbangan judex factie dalam putusannya yang menyatakan tidak terbukti unsur dengan sengaja unsur menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih

pada 1 (satu) TPS atau lebih. Oleh karena itu berdasar hukum apabila Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dinyatakan DITOLAK.

Berdasarkan uraian di atas, Terbanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding penuntut umum untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 2/Pid.S/2018/PN.Sgm tanggal 10 Agustus 2018;-----



mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm, tanggal 10 Agustus 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 178 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan / fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 2/Pid.S/2018/PN

memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm, tanggal 10 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, pasal 178 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 2/Pid.S/2018/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami: **MAKKASAU, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH**

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugalah persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggotasertadibantuoleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.Hum.

Ttd

AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI,**

Ttd

**H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa
Atas Permintaannya, berdasarkan Surat No. 0006/K.SN-06/HM.02.00/I/2019
tertanggal 27 Januari 2020

Sungguminasa, tanggal 14 Februari 2020.
Pengaduan Negeri Sungguminasa Kelas 1A
Sh.Panitera



Siswaty
SISWATY, S.H., M.H

Nip. 19840124 200912 2 002